



ABSTRAK

Kota Surakarta sedang gencar mengadakan penataan parkir ditengah jumlah kendaraan yang tidak terkendali. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membuat Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang memberikan kewenangan kepada Dishubkominfo Kota Surakarta untuk melakukan pengembokan roda pada kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir. Namun di dalam pelaksanaannya, kebijakan baru ini ternyata memunculkan dinamika. Penelitian ini mengambil lokus di *city walk* Kota Surakarta di mana kawasan ini merupakan perwajahan kota dan merupakan *pilot project* pelaksanaan kebijakan ini. Belum adanya penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian parkir dengan pengembokan roda dan beberapa masalah berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut menjadikan bahasan ini menarik untuk dikaji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi “pengembokan roda” dalam rangka menekan pelanggaran parkir di *city walk* Kota Surakarta, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan model pendekatan hibrida yang menyatukan Stufflebeam’s CIPP model yang perspektif *top-down* dengan pendekatan *bottom-up*. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* sedangkan data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder yang diperoleh dari wawancara mendalam, dokumentasi, juga observasi non partisipan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yakni analisis interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengembokan roda di *city walk* Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik dan efektif digunakan untuk menekan angka pelanggaran parkir. Kemudian ditemukan pula bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya komponen-komponen pendukung pelaksanaan kebijakan semata namun dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari kelompok sasaran dan sikap *street level bureaucrat* dalam menyampaikan kebijakan. Selain itu, terdapat hasil temuan yang menunjukkan adanya permasalahan yang menjadikan kebijakan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, antara lain: masih adanya pertentangan antar *stakeholder* di *city walk*, adanya ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), kurangnya koordinasi antar *street level bureaucrat* terkait teknis penindakan di lapangan, terdapat *negative side effect* dari kebijakan di mana ada kepentingan toko-toko lama dan juru parkir di kawasan *city walk* yang dikorbankan, janji pemerintah untuk membangun kantung-kantung parkir di *city walk* belum terlaksana dan solusi yang ditawarkan pemerintah tidak dapat diterima oleh pengunjung *city walk* karena minimnya fasilitas untuk menyeberang jalan.

Kata kunci: studi implementasi, monitoring evaluasi, teori hibrida, CIPP, *top down*, *bottom-up*, pengembokan roda, *city walk*



ABSTRACT

Regional government of Surakarta (Pemkot Surakarta) has conducted intensive parking arrangement amid uncontrolled growth of vehicles including made Regional Regulation of Surakarta No. 1/2013 (Organizing Transportation). This regulation authorizes the Surakarta Transportation Communication Informatics (Dishubkominfo Surakarta) to implement locking-wheel policy to the car that parked in unauthorised places. However implementation process of this new policy creates dynamics.

This research took place in the Surakarta citywalk where this area is the appearance of the city and pilot project for the policy implementation. It aims to investigate the implementation process of locking-wheel policy at Surakarta city walk as well as determine factors that influence its implementation. This descriptive kualitatif research employs a mix approach or a hibrid approach to obtain comprehensive data that helps researcher analyzing this policy implementation. The first one is Stufflebeam's CIPP model as the top-down instrument. The second one is the bottom-up instrument with two main focuses: street level bureaucrat and target group. It applies purposive sampling and uses primary and secondary data that are derived from indepth interview, documentation and nonintervention observation. Furthermore, the data analysis used is interactive analysis by Miles and Huberman. Whereas for the data validity used data triangulation technique.

The results show that the implementation of locking wheel policy at Surakarta citywalk has been going well and quite effective to reduce parking violations. Moreover, it found that the successful implementation of this policy not only determined by the fulfillment of supporting components of this policy, but also influenced by active participation of the target group and the attitude of street-level bureaucrats in delivering the policy. The findings that indicate problems which make the policy implementation is not fully effective such as: there is conflict of interests between stakeholders; lack of compliance with the standard operating procedures (SOP), lack of coordination among street-level bureaucrat related technical action; there are negative side effects of the policy implementation because of the interests of the old business owners—that have been long-standing at citywalk area and parking attendants in citywalk area is sacrificed; Pemkot Surakarta's promise to build parking pockets around the citywalk has not been done and the solutions offered by the local government that is parking on Jl. Slamet Riyadi—the main road in Surakarta—can not be accepted by visitors because of the lack of facilities to cross the road.

Keywords: *implementation study, monitoring evaluation, hybrid theory, CIPP, top-down, bottom-up, locking-wheel, citywalk.*